PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR AIR BERSIH DI KABUPATEN LINGGA TAHUN 2017-2018

Oleh : Nadia Bella Savitri

Nadiabellasy@gmail.com

Dosen Pembimbing : Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12.5 Simpang Bau Pekanbaru 28293

Relp/Fax. 0761-63277

ABSTRACK

Lingga regency is an area that has a lot of water sources from water springs, watershed, and raw water. However the need clean water for community in Lingga regency has not been fulfilled because water supplies are uneven. Community's need will continue to increase clean water. The condition of water container does not fit the needs of clean water. Then, the authors see the implementation of clean water infrastructure development in Lingga Regency and the inhibitory factor of implementing clean water infrastructure development of in lingga regency in 2017-2018.

The purpose of this study is to describe how local government in giving authority to the PUPRPKP Service and to give authority to PDAM and what are the factors that influence these authorities by using the theory of authority and focus on accountability criteria. This study used a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study are the implementation of clean water infrastructure development in Lingga regency based on the deconcentration principle, the Department of PUPRPKP Lingga was given authority that is the field of copyrighted work and water resources to develop clean water by making physical buildings to accommodate clean water and cooperation with BWS IV Province of Kepulauan Riau as a water resource manager that is a working unit the Ministry of public work & housing and PDAM as a clean water service provider to the community and have the authority to find a water source. Pipeline system is an activity undertaken by PDAM while non pipeline activity undertaken by community relate to the development of clean water in the village. The inhibitory factor in implementing the development of clean water infrastructure in Lingga Regency is limited budget, and still dependent on local government then the limited workforce and water sources are far from reach.

Keywords: *Accountability, Administration, Law, Politics*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air menyatakan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Kemudian sumber daya air juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi "*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" yang artinya dapat disimpulkan bahwa bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan juga digunakan untuk kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintah wajib dan pilihan. Urusan wajib yakni untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah. Dalam urusan wajib ini salah satunya terdapat pelayanan dasar dimana dalam pengembangan penyediaan air bersih termasuk dalam kategori urusan terkait pelayanan dasar (pasal 12 ayat (1)).

Kabupaten Lingga memiliki kualitas daya dukung lingkungan kurang bagus untuk menyediakan air bersih. Berdasarkan hasil analisis lahan di Kabupaten Lingga sebagian besar memiliki potensi sangat rendah dalam menyediakan air bersih yaitu seluas 188,866.46 ha atau 81.15% dari seluruh wilayah. Sementara sisanya sekitar 43,880.59 ha atau 18.85% memiliki potensi rendah dalam menyediakan air bersih. Hal ini terjadi dikarenakan Kabupaten Lingga merupakan daerah kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dan merupakan Pegunungan Denudasional. Daya dukung lingkungan yang berpotensi rendah dalam menyediakan air bersih paling besar berada di Kecamatan Singkep Barat yaitu seluas 17,633.95 ha atau sekitar 7.58 % dari seluruh wilayah Kabupaten

Lingga. Sementara daya dukung lingkungan yang memiliki potensi sangat rendah berada di Kecamatan Senayang sebesar 41,258.79 ha atau 17.73 %. Sebaran potensi daya dukung lingkungan penyedia air bersih di Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga dalam mengembangkan air bersih berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 3 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah menjelaskan Berdasarkan kewenangannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dapat disingkat dengan PUPRPKP Kabupaten Lingga memberikan kewenangan terkait pelaksanaan pengembangan air bersih kepada Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air. PDAM Kabupaten Lingga berwenang memberi pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Lingga dan kemudian mendistribusikan air tersebut kepada masyarakat dan PDAM Kabupaten Lingga memiliki tugas yaitu mengembangkan air bersih dengan cara mencari sumber air baku yang baru di setiap daerah yang ada di Kabupaten Lingga. Pengembangan air bersih dilaksanakan oleh Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga berkerja sama dengan PDAM Kabupaten Lingga kemudian setelah dikembangkan secara teknis dan operasional hal tersebut diimplementasikan oleh PDAM sebagai lembaga ekonomi satu-satunya penyelenggara dan penyedia air bersih hingga sampai kepada masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, kebutuhan masyarakat serta peningkatan ekonomi masyarakat mengakibatkan kebutuhan air bersih pun juga menjadi meningkat. Ketersediaan air bersih yang meningkat maka akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, jasa, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyak masyarakat

menikmati ketersediaan air bersih dikarenakan minimnya daya tampung infrastruktur air bersih. Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga masih tergolong sedikit seperti bak penampungan yang ada masih berukuran kecil, bahkan ada yang telah lama tidak digunakan lagi sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dan ketersediaan air bersih sekarang menjadi minim karena disebabkan berbagai kendala seperti untuk mencari dan mengembangkan air bersih yang baru menjadi sulit dikarenakan sumber air baku yang ada telah dicerami oleh berbagai kegiatan seperti penambangan timah, penebangan liar disekitaran sumber air baku yang ada meskipun sumber daya air di Kabupaten Lingga terhitung sangat banyak padahal ketersediaan air yang ada tidak sepadan dengan kebutuhan minimal sehari-hari masyarakat di Kabupaten Lingga, permasalahan yang sering terjadi diantaranya terkait infrastruktur yaitu masih sering terjadinya kebocoran pipa khususnya di Pulau Singkep maka disini peneliti menjadi tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Lingga bersama dengan PDAM Kabupaten Lingga agar pengembangan air bersih dapat digunakan masyarakat sebagaimana mestinya.

Berdasarkan gejala diatas, penulis tertarik untuk meneliti **“Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018”**

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah diajukan dalam bentuk pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga tahun 2017-2018?

¹ Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jogyakarta : Laks Bang Pressindo. Hlm. 55.

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga 2017-2018?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga tahun 2017-2018.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018.

Kerangka Teori

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah.¹ Menurut Dodi haryono, Kewenangan dalam Bahasa Inggris disebut juga *authority*. Ditinjau dari aspek ilmu politik. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga untuk melakukan sesuatu.² Menurut Widjaja (2007:164) yang dikutip oleh Arenawati, untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang konkuren secara proporsional antara pemerintah, daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota maka disusunlah kriteria yang meliputi: eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antara

² Dodi Haryono, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau 2012) Hlm. 56.

pemerintahan. Dapat dijelaskan masing-masing kriteria sebagai berikut:³

1. Kriteria Eksternalitas adalah penyelenggara suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Jadi pendekatan dalam pembagian urusan pemerintah adalah dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut. Apabila dampak ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintah tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional maka akan menjadi kewenangan provinsi dan apabila bersifat nasional maka menjadi urusan pemerintah.
2. Kriteria Akuntabilitas adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pendekatan ini pemerintah adalah dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintah yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung dekat dengan dampak/akibat urusan dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintah tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

3. Kriteria Efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Jadi dalam pendekatan ini harus mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan pemerintah. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penangannya dipastikan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangani oleh provinsi dan atau daerah kabupaten/kota, maka dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Sebaliknya apabila lebih berdaya guna dan berhasil guna oleh pemerintah, maka tetap dilakukan oleh pemerintah. Ukuran hasil guna dan daya guna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat besar kecil resiko yang harus dihadapi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian di Kabupaten Lingga Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

³ Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Graha Ilmu : Yogyakarta. Hlm 48.

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga dan PDAM Kabupaten Lingga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

Pengembangan air bersih di Kabupaten Lingga merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari sumber-sumber air baku yang baru kemudian air tersebut dapat digunakan oleh masyarakat agar dapat menjalan kehidupan yang layak dan terpenuhi air bersih yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat yang kemudian dibuat berbagai infrastuktur air bersih seperti bendungan untuk menampung air bersih tersebut. Sedangkan pembangunan infrastuktur air bersih merupakan suatu kegiatan yang berupaya untuk menyediakan air bersih dengan cara membuat bangunan fisik untuk menampung air bersih tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu air bersih, air bersih merupakan air yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih yang ditetapkan, air baku merupakan sumber air yang tidak perlu diolah terlebih dahulu menjadi air bersih atau air minum, sedangkan air minum adalah air yang telah memenuhi syarat air minum sebelum dikonsumsi sesuai SNI 01-0020-1987 berdasarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman-Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengembangan infrastruktur air bersih merupakan wujud dari asas dekonsentrasi yakni pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah Provinsi dan Kabupaten yang mana pengembangan infrastruktur air

bersih di Kabupaten Lingga merupakan kewenangan Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga Bidang Cipta Karya dan Sumber Daya Air untuk mengembangkan air bersih dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur yang ada sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga dimana pasal pasal 18 Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari beberapa bidang dan beberapa bidang tersebut dibagi lagi menjadi sub bidang, dimana disini yang bertugas mengembangkan dan menyediakan infrastruktur air bersih adalah Bidang Cipta Karya dan Bidang Sumber Daya Air.

Pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga, Dinas PUPRPKP Kabupaten Lingga bekerjasama dengan Satuan Kerja Badan Wilayah Sungai (BWS) Sungai Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, satuan kerja ini merupakan badan yang berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:05/PRT/M/2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjelaskan BWS IV Sumatera Provinsi Kepulauan Riau miliki tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, embung, dana, situ, bendungan, dan tampungan lainnya. Dengan melaksanakan pengembangan infrastruktur air bersih tersebut Pemerintah Kabupaten Lingga dan (BWS) Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama untuk mengembangkan air bersih yang berasal dari sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten Lingga dengan memanfaatkan sumber air baku yaitu sebagai berikut:

10.	Air baku Bukit Belah	140 l/dt	Review Desain 2015
-----	----------------------	----------	--------------------

Sumber: Balai Wilayah Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, 2019

Tabel 1
Potensi Air Baku di Kabupaten Lingga
(yang sudah di studi dan desain)

No	Sumber Air Baku	Debit Ait	Lokasi
1.	Air baku Desa Benan	3,4 l/dt	SID Air baku Kecamatan Senayang 2017
2.	Air baku Desa Tajur Biru	1,5 l/dt	SID Air baku Kecamatan Senayang 2017
3.	Air baku Pulau Sebangka	6 l/dt	SID Air baku Kecamatan Senayang 2017
4.	Air baku Pa Mentok	32 l/dt	FS Air Baku Kabupaten Lingga 2017
5.	Air baku Sungai Daik	68 l/dt	FS Air Baku Kabupaten Lingga 2017
6.	Air baku Kado	25 l/dt	FS Air Baku Kabupaten Lingga 2017
7.	Air baku Cik Latif	39 l/dt	FS Air Baku Kabupaten Lingga 2017
8.	Air baku Bukit Bendera	20 l/dt	FS Air Baku Kabupaten Lingga 2017
9.	Air baku Sungai Raya	40 l/dt	Review Desain 2015

Keterangan:

SID : Survei Invertigasi dan Desain

FS : Studi Kelayakan

Pada sistem perpipaan merupakan kewenangan PDAM Kabupaten Lingga pipa digunakan untuk pengaliran air pada bak penampungan yang berasal dari sumber air dan kemudian baru di distribusikan ke bak intanke dan reservoir yang berada di PDAM menggunakan sistem gravitasi. Sistem perpipaan di Kabupaten Lingga disini berupa pipa besi sederhana yang menghubungkan ke bak reservoir yang berada di kawasan sumber daya air yang ada jaringan perpipaan.

Pada pelayanan sistem non perpipaan yang mana dikelola oleh masyarakat itu sendiri, pihak Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang jauh lingkupnya dari jangkauan PDAM Kabupaten Lingga dan daerah yang jauh dari perkotaan, ada beberapa desa yang diberikan untuk mengelola air bersih sendiri dengan menggunakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan mempertimbangkan sumber daya air yang ada di tiap desa yang jika dikelola dengan baik maka akan memberi manfaat yang cukup besar bagi Desa tersebut.

Sejauh ini sudah ada beberapa desa yang telah diketahui untuk mengelola air bersih, yang mana dalam mengelola air bersih tersebut sudah disepakati oleh pihak Pemerintah Kabupaten, dari hasil yang didapati oleh penulis dari website resmi Kabupaten Lingga Kabupatenlingga.go.id ada beberapa desa yang telah mengelola air bersih sendiri diantaranya yaitu Desa Panggak Darat yang sumber air dari kaki Gunung Sipincang kemudian akan dialirkan

ke Desa Panggak Laut dengan masing-masing rumah membayar iuran Rp. 15.000 perbulan dan Dusun Centeng Desa Limbung yang mendapatkan sumber air berasal dari sumber mata air Senayang yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2016 dengan anggaran Rp. 2.100.000.000 milyar yang mana pembangunan sarana dan prasarana air bersih ini sudah dinanti lama oleh masyarakat setempat. Berikut beberapa desa yang telah mengelola air bersih sendiri:

Tabel 2
Daftar Desa Jaringan Non Perpipaan

No.	Desa/Dusun	Sumber Mata Air
1.	Desa Panggak Darat	Kaki Gunung Sipincang
2.	Desa Panggak Laut	Kaki Gunung Sipincang
3.	Dusun Centeng	Sumber Mata Air Senayang
4.	Desa Limbung	Sumber Mata Air Senayang

Sumber: *LinggaKab.go.id*, 2020

Selain mencari sumber air baku PDAM juga memiliki wewenang yaitu menjaga kualitas air agar tetap bersih. Pada pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih tidak lepas dari tahapan air kotor yang diolah kemudian menjadi air bersih Hal ini menyebabkan air yang harus dikonsumsi harus diolah dulu sebelum bisa disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan kewenangannya pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga dalam Pasal 28 bagian cabang teknik dimana Kepala Seksi Teknik memiliki Tugas:

a. Menyelenggarakan pengendalian atas kualitas, kuantitas dan kontinuitas

produksi air termasuk menyusun rencana kebutuhan produksi.

b. Menjaga kualitas melalui test laboratorium serta mengadakan evaluasi dari hasil tes sesuai dengan kondisi air baku saat diproduksi.

Untuk menguji kualitas air produksi pihak PDAM Kabupaten Lingga sebelum disalurkan kemasyarakat, PDAM melakukan pengujian di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) yang berkedudukan di Kota Batam dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2017-2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
Kualitas Air Yang Produksi Tahun 2017-2018

No.	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM)	Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM)

Sumber: *Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga*, 2019

Untuk Memenuhi Syarat Air Minum (MSAM) diperlukan beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan fisik, diantaranya tidak berasa, tidak berbau, dan tidak bewarna.
2. Persyaratan kimia, yang tidak mengandung bahan kimia terlarang salah satu contohnya tidak mengandung logam berat.
3. Persyaratan mikrobiologi, yaitu air yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit yang berbahaya.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan melaksanakan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan

secara berkala. Untuk itu pada pembahasan pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga pada kewenangan menurut Widjaja yang dikutip oleh Arenawati terdiri dari eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang kemudian penulis memfokuskan pada akuntabilitas karena akuntabilitas ada kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas dibagi menjadi 3 dimensi yaitu administrasi, hukum, dan politik.

2.1 Administrasi

Akuntabilitas dalam hal administrasi adalah kewajiban dalam menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka otoritas dan sumberdaya yang tersedia. Terkait dengan pendanaan untuk melaksanakan pengembangan air bersih di Kabupaten Lingga, sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PUPRKP tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4
Data Anggaran Program Pengembangan Air Bersih Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

N o.	Capaian Kinerja Program/kegiatan	2017	2018
1.	Pembangunan sarana dan prasarana air baku	Rp. 222.141.500	-
2.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum/bersih dan air limbah	Rp. 1.302.939.500	-
3.	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih atau air minum	-	Rp. 12.893.950.778

Sumber: Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan dan Pemukiman Kabupaten Lingga, 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan dan Pemukiman Kabupaten Lingga hanya menyiapkan pendanaan pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih secara umum, tidak menyebutkan mata anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan air bersih.

2.2 Hukum

Akuntabilitas dalam hal hukum adalah menjamin tegaknya supremasi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air Pasal 34 ayat (2) menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya air dilaksanakan tanpa merusak lingkungan. Namun kenyataan yang terjadi pada pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitaran sumber daya air kaki Gunung Muncung yang berlokasi di Dabo Singkep.

Tak hanya lingkungan sumber air baku juga menjadi rusak akibat dari pembangunan Bendungan Gemuruh diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab guna mengambil kayu yang ada di dekat daerah sekitaran bendungan. Penebangan liar memang menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kabupaten Lingga dikarenakan penebangan liar yang nanti kayunya akan diolah menjadi kayu balok kemudian akan dijual keluar Kabupaten Lingga menjadi salah satu yang dianggap biasa saja bagi masyarakat yang melakukan penebangan liar dan belum ada tindakan nyata yang dilakukan untuk menghentikan aktivitas penebangan liar berikut.

2.3 Politik

Akuntabilitas dalam hal politik adalah biasanya dihubungkan mandat yang diberikan kepada masyarakat kepada politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan. Pada pelaksanaan pengembangan infrastruktur ini mandat yang diberikan kepada anggota legislatif yaitu pada keluhan masyarakat pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur air bersih. Rencana kedepan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yaitu Dinas PUPRKP bersama DPRD Kabupaten Lingga yaitu akan menyalurkan sumber air Jelutung yang berada di Pulau Lingga yang dekat dengan perbatasan Kota Batam dan Pulau Bintan kemudian dalam pelaksanaan pembangunan air Jelutung Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga dan DPRD Kabupaten Lingga akan bekerja sama dengan BWS Sumatera IV Provisni Kepulauan Riau yang merupakan Satuan Kerja dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

Dalam melaksanakan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018 berdasarkan kewenangan kriteria akuntabilitas tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga yaitu sebagai berikut:

3.1 Anggaran

Anggaran menjadi salah satu penyebab faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga. Dalam pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lingga berdasarkan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah terdapat beberapa hal yang menyebabkan terbatasnya anggaran untuk pengembangan infrastruktur air bersih yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman yang kurang mendalam tentang Penatausahaan Keuangan di OPD.
2. Perlunya ditingkatkan pemahaman bersama tentang penyusunan, pengendalian dan pengelolaan keuangan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Kewenangan Pemerintah dalam pengembangan air bersih di Kabupaten Lingga sebagai daerah perbatasan Tahun 2017-2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air pada Pasal 34 ayat (2) menjelaskan sumber daya air harus dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup dan merupakan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lingga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah dan PDAM Kabupaten Lingga memiliki wewenang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait air bersih dan mencari sumber air baku yang baru berdasarkan Visi dan Misi PDAM Kabupaten Lingga. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih juga menggunakan asas Dekonsentrasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke Provinsi dimana disini Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai IV Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2019 merupakan satuan kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan dan sebagai pengelola sumber daya air. Sistem perpipaan dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Lingga dan juga Dinas PUPRKP Kabupaten Lingga kemudian sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat menggunakan anggaran BUMDes.

2. Pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga juga dilihat dalam hal administrasi terkait dengan laporan kerja akuntabilitas instansi pemerintah, dalam hal hukum terkait peraturan yang berlaku di Daerah Kabupaten Lingga dan dalam hal politik yaitu berdasarkan mandat yang telah masyarakat berikan kepada badan legislatif yaitu disini adalah DPRD Kabupaten Lingga Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terkait pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga yaitu seperti dari anggaran yang masih bergantung kepada pemerintah daerah, dan terbatasnya sumber daya manusia.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan pengembangan infrastruktur air bersih di Kabupaten Lingga tahun 2017-2018 penulis memberikan saran pada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Pemerintah daerah seharusnya memberi anggaran khusus terkait kegiatan pengembangan infrastruktur air bersih karena bangunan fisik yang tersedia sekarang masih belum memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari masyarakat dan kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lingga dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga dari anggaran tersebut dapat

melaksanakan kegiatan pengembangan infrastruktur air bersih sesuai dengan kewenangannya.

2. Agar masyarakat tidak lagi melakukan penambangan liar, karena terjadinya penambangan liar tadi selain merusak lingkungan juga merusak air baku dekat bak penampungan sehingga harus ada sosialisasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menjaga dan merawat lingkungan sekitar termasuk menjaga sumber daya air yang ada di Kabupaten Lingga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan

- Adisasmita Raharjo. 2010. "*Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. "*Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arenawati, 2014. "*Administrasi Pemerintah Daerah, Sejarah, Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia*". Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Haryono, Dodi, 2010. "*Hukum Administrasi Negara*". (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau)
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar. 2014. "*Metodologi Penelitian Sosial*". Jakarta: Bumi Aksara.
- Ihmar, Aminuddin, 2013, "*Hukum Tata Pemerintahan*". Yogyakarta: PT Grafindo.
- Napitupili, Paimin, 2007. "*Pelayanan Publik dan Customer Reaction*". Bandung: PT. Alumnus.
- Putra, Windhu, 2018, "*Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*". Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Sadjijono. 2008. "Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara". Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.

Sjafrizal. 2016. "Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi". Jakarta: PT RajaGrafindo Perdasa.

Sangadji, Mamang Etta. 2010. "Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian". Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Sri Rahayu, Ani, 2018. "Pengantar Pemerintah Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya". Jakarta : Sinar Grafika.

Sudrajat, Tedi, 2011 "Hukum Birokrasi Pemerintahan, Kewenangan, dan Jabatan". Jakarta : Sinar Grafika.

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004
Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015
Tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2010
Tentang

Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lingga

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 11 Tahun 2011
Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga

Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati Lingga Nomor 45 Tahun 2014
Tentang Sistem Penyelenggaraan dan Penyediaan Air Minum Kabupaten Lingga

Dokumen

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037

Dokumen Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lingga Tahun 2011-2031

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lingga Tahun 2016-2021

Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Satuan Kerja Badan Wilayah Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2018

Dokumen Rencana Kegiatan Pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lingga Tahun 2017-2018

Dokumen Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPJI2M) Kabupaten Lingga Bidang Cipta Karya kabupaten Lingga

Jurnal

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Delzi Sofiana Dewi. 2015. *Peran pemerintah Daerah dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Desa Pulau Jambu Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan Desa Selunak Kecamatan Batang Pinarap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011-2013)*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Rizki Azwandi. 2014. *Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indra Memberikan Pelayanan dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Muhammad Arofah. 2017. *Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Siak Pekanbaru Tahun 2015.*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Dwi Susanti. 2016. *Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2012-2014.*

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau: Dian Siska

Pratiwi, 2017. *Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agrubisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Sikijang Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing Tahun 2013-2016*

Website

www.linggakab.go.id

<http://mediatergetbuser.com/artikel-391-Pembangunan-Dam-10M-Diduga-Salah-Prosedur.html>

<http://indenpenden.news.comedisi/2017/01/11/proyek-pembangunan-dam-air-gemuruh-meresahkan-masyarakat-dabo>

<https://sijoritoday.com/2017/05/18/tambang-timah-ilegal-cemari-air-minum-dabo-singkep>